

Problematika Pembiayaan Pendidikan di Sekolah

Arta Wida Anastasia Purba¹ , Nisa Teresia Four Nigerls Situmeang² , Dini Fitriani³
,Khoirani Febry⁴ ,Fatimah Sihombing⁵ , Yunita Rahma Siregar⁶

Universitas Negeri Medan

E-mail : dinifitriani2512@gmail.com, Khoiranifebry8@gmail.com

fatimahsihombing20@gmail.com, snisateresa17@gmail.com artapurba.24@gmail.com ,
yunitarahmahsrg02@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Problematika Pembiayaan Pendidikan di Sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Untuk dapat tercapai tujuan pendidikan yang optimal, maka salah satunya hal paling penting adalah mengelola biaya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan. Administrasi pembiayaan minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyaluran anggaran perlu dilakukan secara strategis dan intergratif antara stakeholder agar mewujutkan kondisi ini, perlu dibangun rasa saling percaya, baik internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri dapat ditumbuhkan. Keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan menjadi kata- kata kunci untuk mewujutkan efektifitas pembiayaan pendidikan.

Keywords:

Problematika, Pembiayaan Pendidikan, Sekolah.

Abstract: This study aims to determine the Problems of Education Financing in Schools. The research method used is a qualitative method. To be able to achieve optimal educational goals, one of the most important things is to manage costs properly according to the required funding requirements. Administration of financing includes minimal planning, implementation and supervision. Budget distribution needs to be carried out strategically

and integratively between stakeholders so that this condition can materialize, mutual trust needs to be built, both internally and between the government and the community and the community and the community itself can be grown. Transparency, participation, accountability in the implementation of education starting from planning, implementation and supervision are the key words for realizing the effectiveness of education financing.

Keywords:

Problems, Education Funding, Schools

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi setiap negara, maju tidaknya sebuah negara di masa yang akan datang dapat di ukur dari seberapa baiknya pendidikan yang sedang berlangsung di negara tersebut, maka dapat dikatakan bahwasannya pendidikan merupakan salah satu alat untuk mencapai cita-cita bagi sebuah negara, begitu juga bagi negara Indonesia yang cita-citanya telah terpampang jelas pada dasar negaranya yaitu menjadi negara yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkesatuan, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial, dalam memperjuangkan cita-cita negara Indonesia tersebut jelas membutuhkan segenap komponen bangsa yang mampu mengemban amanat kelima dasar negara tersebut, dan salah satu jalan yang dapat di tempuh negara untuk melahirkan generasi yang dapat di andalkan adalah dengan cara memberikan mereka semua pendidikan yang terbaik dan terjangkau bagi seluruh elemen masyarakat.(Suprpti, 2014).

Dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia senantiasa terjadi perubahan, perubahan tersebut terjadi baik pada bidang manajerial maupun administrasinya, reformasi administrasi dan manajemen ini memiliki tujuan untuk menyempurnakan sistem dari kedua komponen di atas, sehingga performa dari setiap individu, kelompok dan institusi dapat meningkat, aktualisasi reformasi administrasi dan manajemen dalam pendidikan dapat berupa pembuatan perubahan inovatif pada kebijakan dan program yang di rencanakan, peningkatan efektivitas pengadministrasian, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berujung pada peningkatan kinerja, dan melakukan antisipasi terhadap tantangan yang mungkin terjadi baik dari dalam ataupun dari luar institusi.(Tolla, 2013).

Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan pada setiap daerah ini juga mencakup kewenangan dalam mengatur pembiayaan pendidikan, pembiayaan pendidikan merupakan sebuah aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang

diterima, dan bagaimana pemanfaatan dana tersebut untuk membiayai segala keperluan dalam pelaksanaan program-program pendidikan (pageluaran), sumber pembiayaan pendidikan yang di terima oleh setiap lembaga pendidikan adalah dari Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD), juga dari iuran masyarakat atau orang tua.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

HASIL

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Biaya Pendidikan dan Sumber Dana Pembiayaan Pendidikan

1. Faktor - faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan

Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan pembiayaan pendidikan sekolah hal ini dipengaruhi oleh:

1. Kenaikan harga (rising prices)
2. Perubahan relatif dalam gaji guru (teacher's salaries)
3. Perubahann dalam populasi dan kenaikannya prosentasi anak disekolah negeri
4. Meningkatnya standard pendidikan (educational standards)
5. Meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah
6. Meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi (higher education).

2. Sumber dana pembiayaan pendidikan

Sumber dana pembiayaan pendidikan

Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Pada bab VIII pasal 33-36 dijelaskan mengenai sumber daya pendidikan.

Sumber pembiayaan pendidikan terdiri dari beberapa bagian :

1. APBN dan APBD merupakan biaya langsung yang terkait dengan penggajian guru, administrator, staf sekolah, pembelian peralatan, materi pelajaran dan gedung sekolah. Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD. Dana APBD berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Dana tersebut tergantung pada kemampuan keuangan pemerintah setempat dan daerah lain. Dana pendidikan yang berasal dari APBD diperuntukkan sama dengan dana yang berasal dari APBN, yakni bisa untuk pendanaan rutin dan untuk pendanaan pembangunan, tergantung pada kebutuhan sekolah. Untuk pendanaan rutin contohnya membayar gaji guru bantu/tenaga honorer. Untuk pendanaan pembangunan direalisasikan untuk rehabilitasi gedung, sarana olahraga dan sejenisnya. Dana APBN pun dapat digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang setiap daerah mendapatkan jatah yang sama dan dana APBD digunakan untuk Bantuan Operasional Pembangunan (BOP). Sedangkan dana rutin, yaitu dana yang dipakai membiayai kegiatan rutin seperti tambahan gaji guru, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, biaya pemeliharaan, dsb.
2. Dana Penunjang Pendidikan berupa beasiswa yang diterima oleh peserta didik untuk menunjang biaya pendidikannya.
3. Dana dari Masyarakat yang berupa bantuan/sumbangan BP3 (sekarang menjadi SPP) yaitu dana untuk peserta didik seperti untuk pembayaran seragam, buku, ATK, transport. Selain sumbangan SPP juga ada dana pembangunan, ialah dana yang dipakai membiayai pembangunan dalam berbagai bidang seperti sarana prasarana, alat belajar, media, dsb.
4. Sumbangan dari Pemerintah Daerah setempat ialah sumbangan yang diterima oleh sekolah dari pemerintah daerah setempat dimana sekolah tersebut berada.
5. Bantuan lain-lain adalah bantuan yang diterima oleh sekolah dari berbagai pihak selain APBN dan APBD, Dana Penunjang Pendidikan, Dana dari Masyarakat, Sumbangan dari Pemerintah Daerah setempat. Bantuan tersebut berasal dari kerjasama sekolah dengan instansi lain atau yang sejenis. Diantaranya ialah bantuan yang berasal dari luar negeri.

Kondisi Pendidikan Indonesia Saat Ini

Kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Apa makna data tentang rendahnya kualitas pendidikan Indonesia itu? Maknanya adalah, jelas ada masalah dalam sistem pendidikan Indonesia. Ditinjau secara perspektif ideologis (prinsip) dan perspektif teknis (praktis), berbagai masalah itu dapat dikategorikan dalam dua masalah, yaitu :

1. Masalah mendasar, yaitu kekeliruan paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan penyelenggaraan sistem pendidikan.
2. Masalah-masalah cabang, yaitu berbagai problem yang berkaitan aspek praktis/teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, seperti mahalny biaya pendidikan, rendahnya prestasi siswa, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraan guru, dan sebagainya.

Mahalny pendidikan masih menjadi perbincangan dan permasalahan masyarakat setiap kali pergantian tahun ajaran, bukan hanya terjadi pada sekolah swasta tetapi juga sekolah yang berstatus negeri. Orang tua siswa harus berfikir kembali untuk melanjutkan anaknya pada jenjang yang lebih tinggi akibat semakin tingginya biaya pendidikan. Sehingga muncul kata dalam salahsatu buku Eko Prasetyo kalau “orang miskin dilarang sekolah”.

Padahal pendidikan adalah suatu bentuk hak asasi yang harus dipenuhi dari lembaga atau institusi yang berkewajiban memenuhinya secara merata, sehingga semua masyarakat dalam suatu bangsa tersebut dapat menikmatinya. Bukannya hanya ditujukan untuk orang yang mampu membayarnya. Mengingat pentingnya pendidikan untuk semua warga, sehingga posisinya sebagai salahsatu bidang yang mendapat perhatian serius dalam konstitusi Negara kita, dan menjadi salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Negara dalam hal ini pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan secara murah dan bahkan gratis untuk masyarakatnya.

Penyebab Mahalnya Biaya Pendidikan

Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SLTP/SLTA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.

Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha.

Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, "sesuai keputusan Komite Sekolah". Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya.

Dampak Mahalnya Pendidikan

Secara umum, dampak dari mahalnya biaya pendidikan adalah:

1. Lemahnya Sumber Daya Manusia

Salah satu sektor strategis dalam usaha pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini memberikan peran yang sangat besar dalam menentukan kualitas dan standar SDM di Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik kedepannya.

2. Lemahnya Taraf Ekonomi Masyarakat

Pendidikan memiliki daya dukung yang representatif atas pertumbuhan ekonomi. Salah seorang pakar pendidikan mengungkapkan bahwa pendidikan dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang, yang kemudian akan meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini berpengaruh pula kepada pendapatan

nasional negara yang bersangkutan, untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin sadar akan pentingnya kesehatan. Pada jenjang pendidikan tinggi, peran pendidikan sangat sentral dalam menghasilkan output-output yang akan berkontribusi untuk mentransformasikan pengetahuan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Konsep Efisiensi Pendidikan

Istilah efisiensi menggambarkan hubungan antara pemasukan dan pengeluaran. Suatu system yang efisien ditunjukkan oleh keluaran yang lebih untuk sumber masukan (resources input). Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Untuk mengetahui efisiensi biaya pendidikan biasanya digunakan metode analasi keefektifan biaya (cost effectiveness method) yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar.

Upaya efisiensi dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu:

1. Efisiensi Internal

Suatu sistem pendidikan dinilai memiliki efisiensi internal jika dapat menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimum. Dapat pula dinyatakan bahwa dengan input yang tertentu dapat memaksimalkan output yang diharapkan. Efisiensi internal sangat bergantung pada dua factor utama, yaitu factor institusional dan factor manajerial.

Dalam rangka pelaksanaan efisiensi internal, perlu dilakukan penekanan biaya pendidikan melalui berbagai jenis kebijakan, antara lain:

- Menurunkan biaya operasional
- Memberikan biaya prioritas anggaran terhadap komponen-komponen input yang langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar.
- Meningkatkan kapasitas pemakaian ruang kelas, dan fasilitas belajar lainnya
- Meningkatkan kualitas PBM
- Meningkatkan motivasi kerja guru
- Memperbaiki rasio guru-murid.

2. Efisiensi Eksternal

Istilah efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode cost benefit analysis, yaitu rasio antara keuntungan financial sebagai hasil pendidikan (biasanya diukur dengan penghasilan) dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Analisis efisiensi eksternal berguna untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya pendidikan atau distribusi anggaran kepada seluruh sub-sub sector pendidikan.

Fattah (2006:43) merumuskan arahan-arahan dalam meningkatkan efisiensi pembiayaan pendidikan sebagai berikut :

1. Pemerataan kesempatan memasuki sekolah (equality of acces)
2. Pemerataan untuk bertahan disekolah (equality of survival)
3. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar (equality of output)
4. Pemerataan kesempatan menikmati manfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat (equality of outcome).

Fungsi Anggaran Pendidikan

Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga.

Anggaran pada dasarnya terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Biasanya dalam pembahasan pembiayaan pendidikan, sumber-sumber biaya dibedakan dalam tiap golongan pemerintah, orangtua, masyarakat dan sumber-sumber lainnya. Sisi pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai.

Fungsi dari anggaran itu meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Merupakan kerangka operasional dalam biaya dan waktu kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Alat untuk mendelegasikan wewenang dalam pelaksanaan suatu rencana.
3. Anggaran dapat pula sebagai instrument kegiatan control dan evaluasi penampilan. Bila besarnya pengeluaran dibandingkan dengan jatah anggaran dan tingkat penggunaan

dapat menjadi ukuran efektivitas atau efisiensi kegiatan yang dilaksanakan Pendanaan Pendidikan menurut PP NO. 48 Tahun 2008.

Permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Sistem anggaran pendidikan di Indonesia masih tergolong kompleks, rumit, birokratis, kaku, dan masih terlalu banyak melibatkan instansi dengan kepentingan masing-masing, memang dengan adanya otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah pemangkasan jalur birokrasi dan penyederhanaan sistem penganggaran pendidikan, namun dalam aplikasinya nyatanya masih banyak permasalahan yang terjadi, dengan pencairan anggaran lewat beberapa instansi DAU, DAK, proyek-proyek pemerintah berskala nasional, regional dan lokal nyatanya mengakibatkan banyak terjadi pengahmburan dan kebocoran anggaran serta penggunaan yang tidak efisien.(Zainuddin, 2015)
2. Perbedaan kondisi di masing-masing daerah yang menyebabkan perbedaan pula pada kemampuan masing-masing daerah dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di daerahnya, daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alamnya secara otomatis akan mendapatkan suntikan anggaran pendidikan yang cukup banyak, tapi sebaliknya bagi daerah-daerah terpencil dan tidak memiliki sumber daya alam yang mencukupi untuk mendukung program otonomi ini akan semakin tertinggal dan mengakibatkan terjadinya ketimpangan kemajuan pendidikan antara daerah yang di kategorikan kaya dan daerah miskin.(Suprapti, 2014)
3. Pelaksanaan otonomi daerah nyatanya selalu menyebabkan bertambahnya tenaga-tenaga struktural di dalamnya, sehingga terjadi peningkatan jumlah SDM, dan peningkatan jumlah SDM ini pasti akan diikuti dengan peningkatan jumlah anggaran yang harus dikeluarkan untuk operasional pendidikan dengan keterbatasan sumber dana di beberapa daerah dan kurangnya konsep efisiensi dalam penggunaannya mengakibatkan permasalahan baru yang terjadi di berbagai daerah.(Suprapti, 2014)
4. Sistem alokasi anggaran pendidikan di setiap daerah yang berbeda-beda, tergantung dengan selera daerah masing-masing menyebabkan terjadinya ketidakmerataan, ketidakadilan, kurang efisien, kurang efektif, dan membuka pintu terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), hal ini menjadikan kondisi anggaran pendidikan di

beberapa daerah semakin memburuk karena terbatasnya pula anggaran dari pemerintah pusat.(Suwandi, 2012)

5. Terjadinya penyelewengan pada pengelolaan dan penyaluran dana ke sekolahsekolah, penyelewengan-penyelewengan tersebut di antaranya adalah : a. adanya pesanan dari pusat soal pengalokasian anggaran pendidikan di daerah, sehingga bertentangan dengan prinsip otonomi pendidikan dan berseberangan dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat. b. Pendistribusian dana yang kurang proporsional antara sekolah kaya dan sekolah miskin, juga terhadap daerah kaya dan daerah miskin. c. Proses penyaluran dana secara birokratis yang di rasa tidak transparan dan mengakibatkan terbukanya pintu untuk terjadinya KKN. d. Peran pemerintah daerah terhadap proses pembiayaan pendidikan masih sangat minim, jikalau ada masih sangat kental dengan kepentingan politik, bukan murni untuk memajukan sektor pendidikan. e. Lemahnya berapa sekolah dalam mengelola anggaran pendidikan di sekolahnya dan kurangnya Oran serta dukungan masyarakat di dalamnya.(Suwandi, 2012)

keterlambatan Pencairan anggaran pendidikan yang tidak sesuai dengan kalender kegiatan pendidikan di masing-masing daerah juga masih menjadi kendala yang tidak kunjung menemukan solusi, hal ini memaksa sekolah untuk menggunakan dana yang harusnya di alokasikan pada kegiatan lain untuk menutup keterlambatan pencairan dana tersebut.(Karno, 2016).

DISKUSI

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa problematika Manajemen Pembiayaan Pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran, pembiayaan, pemeriksaan. Serta pendidikan membutuhkan biaya, Pembiayaan terhadap pendidikan harus dibayar lebih mahal karena pendidikan adalah investasi. Peranan biaya dalam mewujudkan mutu pendidikan memberi kontribusi besar dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, perolehan keterampilan dan kemampuan yang di dapat dari pendidikan akan menghasilkan tingkat balik (Rate of Return yang sangat tinggi terhadap penghasilan seseorang..

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulisan jurnal ini kami tulis guna memenuhi tugas terstruktur yang diwajibkan dalam mengikuti perkuliahan mata kuliah “Problematika pendidikan” pada semester VI tahun 2023. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kami yang telah mengarahkan kami, dan bagi teman-teman yang turut mendukung penyelesaian jurnal ini terkhusus teman setim. Dimana di dalam pembuatan jurnal ini diambil dari berbagai macam referensi yang merupakan salah satu sarana yang mana harapannya dapat membantu peserta didik memahami dan mendeskripsikan serta untuk mengembangkan secara maksimal potensi yang dimiliki peserta didik.

REFERENSI

- Fattah, N. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadari, Nawawi. 1989. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Mas Agung.
- Sagala, Syaiful. 2009. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardan, Dadang, dkk. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabet
- Hasanah, Aan. 2012. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hartono. (2015). Otonomi pendidikan. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 14, 51–66.
- Hidayat, N. (2016). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan. *Society*, VI(35), 35–49. Retrieved from http://data4.blog.de/media/285/1849285_62da7ea644_d.pdf
- Karno, E. (2016). Pemerintah Responsif Pendidikan. *Shautut Tarbiyah*, (November), 18–38.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>
- Negeri, B. P. dan P. K. D. (2017). Menelisik Sejarah Otonomi Daerah. *Media BPP Kementerian Dalam Negeri*, 2(3), 1–60.
- Oktafia, R. (2018). Poverty Alleviation : An Economic Practice Study of Islamic Culture. *98(Icpsuas 2017)*, 345–348.
- Oktafia, R., & Haryanto, B. (2018). Pengelolaan Keuangan Unit Usaha : Strategi Pengembangan Kapasitas Pondok Pesantren. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 141. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p141-151>
- Putra, R. E., & Valentina, T. R. (2010). Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Demokrasi*, IX, 71–92.
- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Criksetra*, 5(9), 79–83.
- Suprapti. (2014). Analisis Kritis Manajemen Madrasah Di Era Otonomi Daerah. *Religi ;Jurnal Studi Islam*, 5(April), 102–123.
- Suwandi. (2012). Arah kebijakan pemanfaatan dan penyaluran dana pendidikan pada era otonomi daerah. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 21(2), 167–178.
- Syakdiah. (2005). Pendanaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, Vol. 9, pp. 109–122.
- Tolla, I. (2013). Administrasi Dan Manajemen Pendidikan Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Eklektika*, 1(1), 107–118.

Toyamah, N., & Usman, S. (2004). Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar. Lembaga Penelitian SMERU, 1–68. Retrieved from <http://www.smeru.or.id/id/content/alokasi-anggaran-pendidikan-di-eraotonomi-daerah-implikasinya-terhadap-pengelolaan>